

LAPORAN KINERJA TAHUN 2022



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

JALAN LINTAS GUNUNGTUA – LANGGA PAYUNG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 telah selesai disusun. LAKIP ini disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran

Penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas pelaporan kinerja.

Berdasarkan hal tersebut, maka semua unit kerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara harus melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami berharap LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ini dapat dilaksanakan dan direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan, semoga dapat bermanfaat bagi semua.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA



HARAHAP, S.Sos, MM

PEMBINA

NIP. 199703 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	3
1.4 Kedudukan Tugas dan Fungsi	4
1.5 Struktur Organisasi	5
1.6 Aspek Strategis	7
1.7 Sistematika Laporan	7
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Perencanaan Kinerja	9
2.2 Perjanjian Kinerja.....	32
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	35
3.2 Analisa Dan Evaluasi Capaian Kinerja	37
3.3 Realisasi Anggaran.....	51
BAB IV : PENUTUP.....	61
4.1 Simpulan Capaian Kinerja.....	61
4.2 Langkah Strategis Penguatan Capaian Kinerja Masa Mendatang.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Inpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Padang Lawas Utara, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dalam mencapai misi dan tujuan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 09 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012 Nomor 61) yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi, Pemberdayaan Perempuan dan Anak berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2019-2023 ada satu misi yang dapat diimplementasikan, yaitu misi ke lima belas” Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan dengan memperhatikan kesetaraan gender dengan mewujudkan kesetaraan SDM”. Salah satu strategi pembangunannya adalah meningkatkan kualitas daya saing SDM. Strategi tersebut di laksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui pemberdayaan perempuan untuk dapat meningkatkan

kesejahteraan keluarga, penanganan keluarga berencana dan perlindungan anak. Arah kebijakannya dilaksanakan melalui:

1. Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam program KB dan KS antara lain melalui peran serta tokoh masyarakat/agama dan Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD).
2. Menambah jumlah PLKB
3. Penataan kembali pengelolaan program KB dengan sistem informasi yang lebih baik dan jejaring kerja yang aktif
4. Penguatan sumber daya manusia (SDM) operasional program KB
5. Pengadaan sarana operasional pelayanan dan KIE program KB
6. Peningkatan partisipasi dan peran perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.
7. Peningkatan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak
8. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.

1.2 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara ini disusun berdasarkan beberapa Dasar hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

9. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang uraian tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan LAKIP adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara, dan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara selama Tahun 2022. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, sehingga program di tahun mendatang dapat disusun dengan fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.4 Kedudukan Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Jabatan Struktural, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas, Badan, Kantor Serta Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Padang Lawas Utara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

A. Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan unsur pendukung tugas Bupati, yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu.

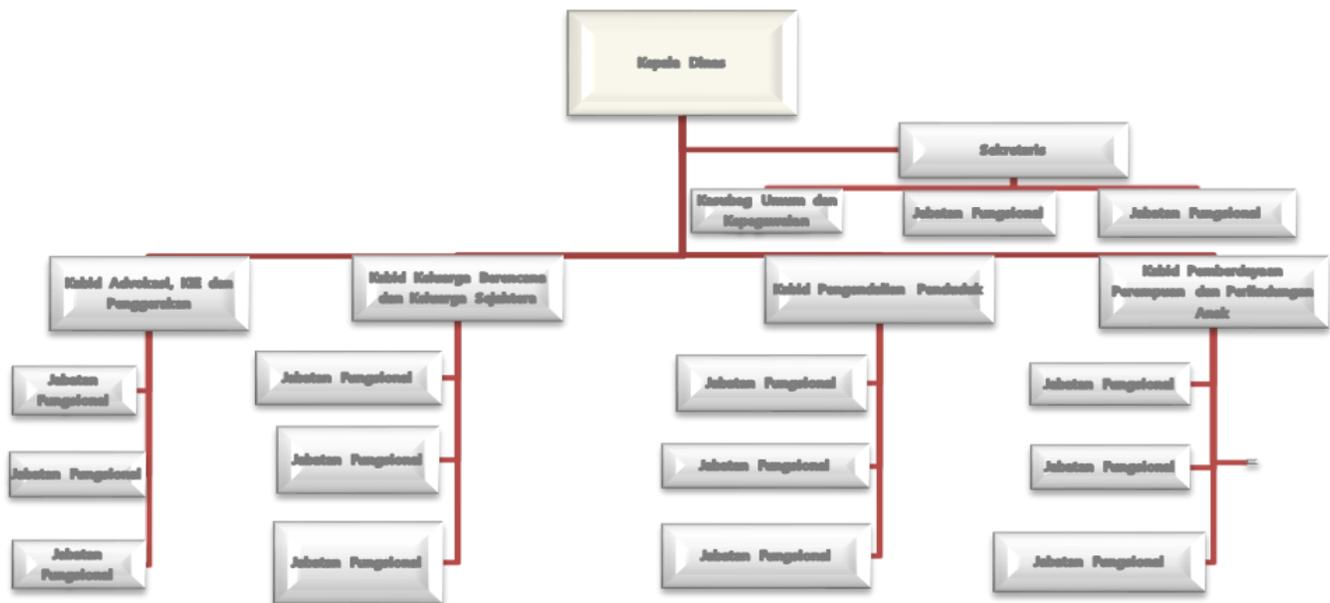
C. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara menyelenggarakan fungsi :

1. Pengendalian Penduduk
2. Keluarga Berencana
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, data dan informasi serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, data dan informasi serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

1.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut:



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 34 tahun 2017 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
 - c. Perencana
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Sub Koordinator Kelembagaan dan PUG
 - b. Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan
 - c. Sub Koordinator Perlindungan Anak
4. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari
 - a. Sub Koordinator Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk
 - b. Sub Koordinator Data dan Informasi
 - c. Sub Koordinator Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
5. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :

- a. Sub Koordinator Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB
- b. Sub Koordinator Fasilitasi Pengelolaan Pelayanan KB
- c. Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga
- 6. Bidang Advokasi, KIE dan Penggerakan
 - a. Sub Bidang Advokasi dan KIE
 - b. Sub Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data
 - c. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga

Jumlah Pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara akhir Tahun 2022 tercatat sebanyak 206 orang, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja
Tahun 2022

No	Bidang	Jumlah Pegawai	
		PNS	Non PNS
1	Sekretariat	7	165
2	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	6	0
3	Bidang Advokasi, KIE dan Penggerakan	4	0
4	Bidang Pengendalian Penduduk	4	0
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8	0
6	Kelompok Jabatan Fungsional	13	0

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2022 berasal dari APBD dan DAK. Rincian total alokasi anggaran belanja dengan rincian belanja sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai sebanyak Rp. 3.524.821.091
2. Belanja Modal sebanyak Rp. 136.501.500
3. Belanja Barang dan Jasa sebanyak Rp. 11.617.847.900

1.6 Aspek Strategis

Dalam rangka melaksanakan kegiatan, maka perlu diperhatikan beberapa aspek strategis yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi yaitu :

1. Adanya APBD untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan Program Kegiatan
2. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan KB
3. Tersedianya Petunjuk Teknis dari BKKBN dalam melaksanakan Kegiatan
4. Tersedianya aturan dasar hukum sebagai pendukung dalam melaksanakan kegiatan

1.7 Sistematika Laporan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berisi pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara selama tahun 2022. Capaian kinerja (performance results) 2022 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Keuangan dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem penyajiannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi alasan penyusunan LKIP dan wujud kepatuhan atas regulasi serta peran penting akuntabilitas kinerja.

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Kedudukan Tugas dan Fungsi
- E. Struktur Organisasi
- F. Aspek Strategis
- G. Sistematika Penyajian LKIP

BAB II PERJANJIAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah rewiu, penjabaran visi dan misi kabupaten, tujuan dan sasaran, kebijakan program, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara.

- A. Perencanaan Kinerja
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Rencana Anggaran Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

- A. Capaian Kinerja tahun 2022
- B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja
- C. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Meliputi tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya

- A. Simpulan Capaian Kinerja
- B. Langkah Strategis Penguatan Capaian Kinerja Masa Mendatang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

2.1.1 Rencana Strategis

Untuk melaksanakan program pembangunan sektor keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak sesuai arah kebijakan pemerintah, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara mengacu pada rencana strategis yang disusun untuk Tahun 2019 – 2023.

Visi adalah rumusan umum tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai di Kabupaten Padang Lawas Utara melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Tujuan penetapan visi adalah untuk mencerminkan apa yang ingin dicapai pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam organisasi dan menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Adapun visi Bupati yang hendak dicapai dalam periode 2019-2023 adalah:

“Bersama Membangun Padang Lawas Utara Beriman, Cerdas, Maju, Dan Beradat”

Untuk mencapai visi tersebut perlu misi untuk menguraikan upaya yang harus dilakukan. Dalam kaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara maka Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dapat diimplementasikan yaitu:

“Misi ke lima belas, meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan dengan memperhatikan kesetaraan gender”.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Padang Lawas Utara menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Menumbuhkan serta meningkatkan kepedulian peran serta masyarakat dalam rangka pemberdayaan keluarga melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
2. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, memfasilitasi penguatan kelembagaan dan

pengembangan mekanisme PUG serta pengelolaan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

- **Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan dari pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2019-2023 yang dapat diterapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu tujuan ke-dua “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat”. Saran dari tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam kurun waktu lima tahun dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu maka yang menjadi tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya penurunan pertumbuhan penduduk menuju keluarga ideal, berkualitas, mandiri, harmonis dan sejahtera.
2. Meningkatnya peran, perlindungan, kualitas perempuan dan anak serta terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Adapun Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

1. Menurunnya pertumbuhan penduduk
2. Meningkatnya peserta KB aktif
3. Bertambahnya jumlah PLKB
4. Meningkatnya kerjasama lintas sektoral
5. Meningkatnya penanganan korban KDRT dan trafficking
6. Meningkatnya koordinasi dan jaringan pengarus utamaan gender (PUG)
7. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara menggambarkan indicator kinerja pada seluruh sasaran, dalam mencapai keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indicator dan target Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai berikut:

Tabel 2.1.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan target Kinerja Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		
				2021	2022	2023
1	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya penurunan pertumbuhan penduduk menuju keluarga ideal,berkualitas,mandiri,harmonis dan sejahtera	Menurunnya pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	3,3	3,2	3,2
			Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 Perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	0,002%	0,001%	0,001%
		Meningkatnya peserta KB aktif	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67,43%	67,5%	67,6%
			Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	20,55%	20,53%	20,51%
2	Meningkatkan peran,perlindungan,kualitas perempuan dan anak serta terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga	Meningkatnya koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,92%	87,93%	87,94%
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,99%	68%	68,1%
		Meningkatnya penanganan korban KDRT dan Traficking	Rasio KDRT	0,008%	0,007%	0,006%

- **2.1.2 Rencana Kerja Tahun 2022**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana kerja tahun 2022 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melaksanakan tugasnya. Perencanaan kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan dimasa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Dinas PP dan PA Serta Pengendalian Penduduk dan KB

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PP dan PA Serta Pengendalian Penduduk dan KB	100%	5.038.612.183	DAU		100%	5.830.175.709
	2,01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas PP dan PA Serta Pengendalian Penduduk dan KB		35.000.000	DAU			30.000.000
		1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas PP dan PA Serta Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	20.000.000	DAU		2 Dokumen	20.000.000
		6 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas PP dan PA Serta Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	5.000.000	DAU		1 Dokumen	5.000.000
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PP dan PA Serta Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	10.000.000	DAU		2 Dokumen	5.000.000
	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas PP dan PA Serta Pengendalian Penduduk dan KB	100%	4.101.762.183	DAU		100%	4.963.845.709

					Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Bulan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PP dan PA Serta Pengendalian Penduduk dan KB	490 OB	3.563.082.183	DAU		490 OB	4.413.845.709
				2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Biaya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas PP dan PA Serta Pengendalian Penduduk dan KB	561 OB	528.680.000	DAU		561 OB	540.000.000
				5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PP dan PA Serta Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	10.000.000	DAU		1 Dokumen	10.000.000
			2,06		Administrasi umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas PP dan PA Serta Pengendalian Penduduk dan KB	100%	523.300.000	DAU		100%	495.600.000
				1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PP dan PA Serta Pengendalian Penduduk dan KB	5 jenis	3.000.000	DAU		5 jenis	3.000.000
				2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas PP dan PA Serta Pengendalian Penduduk dan KB	47 jenis	204.300.000	DAU		47 jenis	170.000.000
				4	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Logistik Kantor	Dinas PP dan PA Serta Pengendalian Penduduk dan KB	1500 kotak	40.000.000	DAU		1500 kotak	40.000.000
				5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas PP dan PA Serta Pengendalian Penduduk dan KB	37500 Lembar	33.000.000	DAU		37500 Lembar	36.300.000
				6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas PP dan PA Serta Pengendalian Penduduk dan KB	12 bln	33.000.000	DAU		12 bln	36.300.000
				9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PP dan PA Serta Pengendalian Penduduk dan KB	1 TA	210.000.000	DAU		1 TA	210.000.000

			2,07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas PP dan PA Serta Pengendalian Penduduk dan KB		60.000.000	DAU			45.000.000
			5	Pengadaan mebel	Tersedianya mebel kantor	Dinas PP dan PA Serta Pengendalian Penduduk dan KB	5 jenis	60.000.000	DAU		5 jenis	45.000.000
			2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PP dan PA Serta Pengendalian Penduduk dan KB	100%	91.300.000	DAU		100%	100.430.000
			1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah materai yang disediakan	Dinas PP dan PA Serta Pengendalian Penduduk dan KB	1200 Materai	8.800.000	DAU		1250 Materai	9.680.000
			2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Biaya/Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PP dan PA Serta Pengendalian Penduduk dan KB	180 mbps bandwtih	22.000.000	DAU		180 mbps bandwtih	24.200.000
						Dinas PP dan PA Serta Pengendalian Penduduk dan KB	33000 kwh	38.500.000			33000 kwh	42.350.000
						Dinas PP dan PA Serta Pengendalian Penduduk dan KB	6000 m3	5.500.000			6000 m3	6.050.000
			4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Peralatan/Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PP dan PA Serta Pengendalian Penduduk dan KB	20 Jenis	16.500.000	DAU		20 Jenis	18.150.000
			2,09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas PP dan PA Serta Pengendalian Penduduk dan KB		227.250.000	DAU			195.300.000
			2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya Biaya/Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas PP dan PA Serta Pengendalian Penduduk dan KB	36 unit/tahun	174.250.000	DAU		36 unit/tahun	109.000.000

				6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Biaya/Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor	Dinas PP dan PA Serta Pengendalian Penduduk dan KB	25 unit/thn	53.000.000	DAU		20 unit/thn	56.300.000
				9	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya Biaya/Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas PP dan PA Serta Pengendalian Penduduk dan KB	-	0	DAU		1	30.000.000
2	08	02			PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab. Padang Lawas Utara	75%	260.000.000	DAU		75%	280.000.000
			2,01		Pelebagaan pengarustamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	Persentase Pelaksanaan PUG dan PPRG di kabupaten/kota	Kab. Padang Lawas Utara		100.000.000				90.000.000
				3	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Padang Lawas Utara	1 Laporan	60.000.000	DAU		1 Laporan	40.000.000
				4	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG, termasuk PPRG	Kab. Padang Lawas	1 Laporan	40.000.000	DAU		1 Laporan	50.000.000
			2,02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			40.000.000				50.000.000
				1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) oleh lembaga penyedia layanan perbankan	Kab. Padang Lawas	30 orang	40.000.000	DAU		-	-
						Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan partisipasi Perempuan di bidang politik	Kab. Padang Lawas	-	-	DAU		60 Orang	50.000.000
			2,03		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan daerah kabupaten/kota	Adanya Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG	Kab. Padang Lawas Utara		120.000.000	DAU			140.000.000

				3	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Pengembangan KIE pelaksanaan PUG	Kab. Padang Lawas Utara	150 orang	120.000.000	DAU		150 orang	140.000.000
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perlindungan Perempuan	Kab. Padang Lawas Utara	70%	60.000.000			70%	60.000.000
			2,02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Perempuan Korban Kekerasan	Kab. Padang Lawas Utara		60.000.000				60.000.000
				1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan Kasus penanganan bagi perempuan korban kekerasan	Kab. Padang Lawas Utara	8 kasus	60.000.000	DAU		8 kasus	60.000.000
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	Kab. Padang Lawas Utara		50.000.000	DAU			45.000.000
			2,02		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Kab. Padang Lawas Utara		50.000.000	DAU		-	-
				2	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota	Pembentukan dan pembinaan desa ramah perempuan dan layak anak	Kab. Padang Lawas Utara	60 Orang	50.000.000	DAU		-	-
			2,03		Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Cakupan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Kab. Padang Lawas Utara		-	DAU			45.000.000
				1	Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Tersedianya Layanan Komprehensif Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	Kab. Padang Lawas Utara	-	-	DAU		50 orang	45.000.000

2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PERSENTASE PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab. Padang Lawas Utara		80.000.000	DAU			120.000.000
			2.01		Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah,non pemerintah,dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Cakupan Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha	Kab. Padang Lawas Utara	-	50.000.000	DAU			50.000.000
				2	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Koordinasi dan Advokasi dengan kelembagaan, klaster 1s/d klaster 4, DU, dan LM demi mewujudkan KLA	Kab. Padang Lawas Utara	70 orang	50.000.000	DAU		50 orang	50.000.000
				2,02	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Persentase Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Kab. Padang Lawas Utara		30.000.000	DAU			70.000.000
				2	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Perumusan kebijakan pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak demi terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Kab. Padang Lawas Utara		-	DAU		1 perbub	30.000.000
				3	Pengembangan komunikasi,informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Peningkatan kualitas hidup anak dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh	Kab. Padang Lawas Utara	6 desa binaan	30.000.000	DAU		6 desa binaan	40.000.000
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PERSENTASE PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab. Padang Lawas Utara		124.000.000	DAU			70.000.000
				2,01	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	Persentase Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Kab. Padang Lawas Utara		54.000.000	DAU		-	-
				1	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan,program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perilaku salah lainnya terhadap anak	Kab. Padang Lawas Utara	60 Orang	54.000.000	DAU		-	-

			2,02		Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Cakupan Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Padang Lawas Utara		70.000.000	DAU		70.000.000
				1	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kasus yang terdampangi terkait anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kab. Padang Lawas Utara	8 Kasus	70.000.000	DAU	8 Kasus	70.000.000
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pengendalian Penduduk	Kab. Padang Lawas Utara		480.000.000			470.000.000
			2,01		Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Persentase Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Kab. Padang Lawas Utara		300.000.000	DAU		290.000.000
				2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Grand Design Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Padang Lawas Utara	1 dokumen	220.000.000	DAU	1 dokumen	210.000.000
				10	Implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Formal dan Non Formal	Kab. Padang Lawas Utara	10 Sekolah	80.000.000	DAU	10 Sekolah	80.000.000
			2,02		Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota	Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Kab. Padang Lawas Utara		180.000.000	DAU		180.000.000
				12	Pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Tersedianya Data Keluarga	Kab. Padang Lawas Utara	53.225 KK	180.000.000	DAU	54.277 KK	180.000.000
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	PERSENTASE PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Kab. Padang Lawas Utara		5.538.916.789			5.317.301.073

			2,01	Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Persentase Pelaksanaan Advokasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Padang Lawas Utara			895.457.000				844.757.000
			1	Advokasi Program KKBPK kepada mitra stakeholder dan mitra kerja	'Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	Kab. Padang Lawas Utara	70 peserta		90.700.000	DAU		40 peserta	40.000.000
			2	Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kerifan budaya lokal	Terlaksananya KIE dan Manajemen Program KKBPK	Kab. Padang Lawas Utara	12 kecamatan		174.757.000	DAK		12 kecamatan	174.757.000
			3	Penyediaan Dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Tersedianya Sarana KIE Program KKBPK	Kab. Padang Lawas Utara	10 desa		330.000.000	DAK		15 desa	300.000.000
			4	Promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Terlaksananya Penyebarluasan dan Promosi Program KKBPK melalui media	Kab. Padang Lawas Utara	-		-	DAU		1 Laporan	30.000.000
			7	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Tersedianya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab. Padang Lawas Utara	12 Balai		300.000.000	DAK		12 Balai	300.000.000
			2,02	Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB	Kab. Padang Lawas Utara			2.927.459.789				3.022.544.073
				Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Kader IMP yang dibina	Kab. Padang Lawas Utara	-		-			50 Kader	30.000.000
			2	Penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB	Jumlah Orang Bulan Honor PLKB Non PNS yang dibayarkan	Kab. Padang Lawas Utara	1620 OB		1.620.000.000	DAU		1620 OB	1.620.000.000

				3	Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPk untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	Jumlah peserta pelatihan Advokasi dan KIE bagi PKB/PLKB	Kab. Padang Lawas Utara	-	-	DAU		40 Orang	40.000.000
				4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader PPKBD dan Sub PPKBD yang dibayarkan honorinya atas pengumpulan data dan pelaksanaan KIE	Kab. Padang Lawas Utara	776 PPKBD dan Sub PPKBD	1.307.459.789	DAK		776 PPKBD dan Sub PPKBD	1.332.544.073
			2,03		Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB	Kab. Padang Lawas Utara		1.416.000.000				1.150.000.000
				1	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota	Tersedianya Alokasi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB di Faskes	Kab. Padang Lawas Utara	22 Faskes	300.000.000	DAU		22 Faskes	300.000.000
				3	Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Padang Lawas Utara	120 Orang	76.000.000	DAU		120 orang	60.000.000
				6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Padang Lawas Utara	12 balai	600.000.000	DAK		12 balai	350.000.000
				8	Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Padang Lawas Utara	700 akseptor	130.000.000	DAU		700 akseptor	130.000.000
				9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Meningkatnya pemahaman kespro dan stunting bagi calon pengantin dan 100 HPK bagi ibu dan keluarga	Kab. Padang Lawas Utara	10 desa	310.000.000	DAK		10 desa	310.000.000

			2,04		Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Ormas dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Kab. Padang Lawas Utara		300.000.000				300.000.000
				1	Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Cakupan Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Program KKBPK	Kab. Padang Lawas Utara	-	-	DAU		50 Orang	40.000.000
				3	Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB	Terlaksananya Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Padang Lawas Utara	12 Kampung KB	300.000.000	DAK		12 Kampung KB	260.000.000
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Kab. Padang Lawas Utara		60.000.000				80.000.000
2	14	4	2,02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Padang Lawas Utara		60.000.000				80.000.000
				2	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Anggota Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Padang Lawas Utara	12 kelompok	60.000.000	DAU		20 kelompok	80.000.000
					JUMLAH				11.691.528.972				12.272.476.782

- **2.1.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022**

Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan Program, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 2.1.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALAIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	3,2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Pelaksanaan Advokasi , Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pelaksanaan Advokasi , Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	12 kecamatan
		Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun(ASFR 15-19), Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern	0,002%		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	776 PPKBD dan SUB PPKBD
2	Meningkatnya peserta KB aktif	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67,43%		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	22 Faskes
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi	20,55%		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan	12 Kampung KB

3	Meningkatnya kerjasama lintas sektoral dan Meningkatnya penanganan korban KDRT dan Trafficking	Rasio KDRT	0,008%	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8 kasus
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	70%
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	300 orang
4	Meningkatnya koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan Meningkatnya Kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	87,92%	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	Persentase Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	250 orang
					Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan daerah kabupaten/kota	150 orang

• **2.1.4 Indikator Kinerja Utama**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (Core business) yang di emban. Indikator Kinerja Utama dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Indikator Kinerja Utama Dinas P3AP2KB merupakan indikator dari sasaran strategis yang di tetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 800/3000/XII/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

Tabel 2.1.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun				Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1	Total Fertility Rate (TFR)	3,370	3,3	3,2	3,2	3,2	
2	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	
3	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)	67,43%	67,43%	67,5%	67,6%	67,6%	
4	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeet need)	20,57%	20,55%	20,53%	20,51%	20,51%	
5	Rasio KDRT	0,008%	0,008%	0,007%	0,006%	0,006%	

6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,92%	87,92%	87,93%	87,94%	87,94%
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,99%	67,99%	68%	68,1%	68,1%

- **2.1.5 Rencana Aksi**

Rencana Aksi adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu. Untuk Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1.5
Rencana Aksi Tahun 2022
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Padang Lawas Utara

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL PELAKSANAAN													
		T	T	T	T							TW 1			TW 2			TW 3			TW 4				
		W	W	W	W							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3				4	6	7	8	9	10	11													
Menurunnya pertumbuhan penduduk dan Meningkatnya peserta KB aktif dan Bertambahnya jumlah PLKB	Total Fertility Rate (TFR) dan Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 Perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Dan Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Dan Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) Dan Jumlah PLKB					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA																			
		√	√	√	√	Pelaksanaan Advokasi , Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pelaksanaan Advokasi , Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	12 Kecamatan	Sosialisasi pentingnya melakukan KB (Keluarga Berencana) dan manfaatnya dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	963.233.700	Bidang KB/KS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		√	√	√	√	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	776 PPKBD dan SUB PPKBD	Terbinanya program KB dan terbinanya masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD	3.530.400.000	Bidang KB/KS, Bidang advin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		√	√	√	√	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	19 Faskes	Penataan kembali pengelolaan program KB dengan sistem informasi yang lebih baik dan jejaring kerja yang aktif	1.046.700.600	Bidang KB/KS		√	√	√	√	√	√		√	√				
				√	√	√	√	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	12 Kampung KB	Sosialisasi pentingnya melakukan KB (Keluarga Berencana) dan manfaatnya dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera kepada Pokja, Poktan dan Lini Lapangan	966.000.000	Bidang KB/KS		√	√	√	√	√	√		√	√		
Meningkatnya kerjasama lintas sektoral dan Meningkatnya penanganan korban KDRT dan Trafficking	Rasio KDRT					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK																			
		√		√	√	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8 Kasus	Terlaksananya pendampingan kasus	66.684.000	Bidang PP/PA				√								√	√	

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya. Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2022 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

Adapun perjanjian kinerja tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara.

2.2.1 Tabel Perjanjian Kinerja 2022

No	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	3,2 poin
		Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 Perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	0,001%
2	Meningkatnya peserta KB aktif	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67,5%
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	20,53%
3	Meningkatnya koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,93%
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68%
4	Meningkatnya penanganan korban KDRT dan Trafficking	Rasio KDRT	0,007%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.045.586.207	P APBD
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 591.192.000	P APBD
3	Program Perlindungan perempuan	Rp. 40.384.000	P APBD
4	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 0	P APBD
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 60.384.000	P APBD

6	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 340.512.000	P APBD
7	Program Keluarga Berencana	Rp. 6.674.315.600	P APBD
8	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Rp. 2.286.400.000	P DAK

2.2.2 Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan 2022

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
Menurunnya pertumbuhan penduduk	Menurunnya pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	3,2 poin	3,2 poin
		Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 Perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 Perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	0,001%	0,001%
Meningkatnya peserta KB aktif	Meningkatnya peserta KB aktif	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67,5%	67,5%
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	20,53%	20,53%
Meningkatnya penanganan korban KDRT dan Traficking	Meningkatnya penanganan korban KDRT dan Traficking	Rasio KDRT	Rasio KDRT	0,007%	0,007%
Meningkatnya koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG)	Meningkatnya koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,93%	87,93%
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68%	68%

No	Program		Anggaran		Keterangan	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.045.586.207	Rp. 4.703.950.391	APBD	P APBD
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 591.192.000	Rp. 784.892.000	APBD	P APBD
3	Program Perlindungan perempuan	Program Perlindungan perempuan	Rp. 40.384.000	Rp. 40.384.000	APBD	P APBD
4	Program Pemenuhan	Program Pemenuhan	Rp. 0	Rp. 155.000.000	APBD	P APBD

	Hak Anak	Hak Anak				
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 60.384.000	Rp. 131.684.000	APBD	P APBD
6	Program Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 340.512.000	Rp. 340.525.800	APBD dan DAK	P APBD
7	Program Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana	Rp. 6.674.315.600	Rp. 6.506.334.300	APBD dan DAK	P APBD
8	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Program Pemberdayaa n dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Rp. 2.286.400.000	Rp. 2.616.400.000	DAK	P DAK

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 dari dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2022. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang yang bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanadalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Capaian Kinerja DP3AP2KB Tahun 2022

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

**Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana
Tahun 2022**

No	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	3,3	3,1
		Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 Perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	0,001	12,35
2	Meningkatnya peserta KB aktif	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67,5%	49,84%
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeetneed)	20,53%	0,33%
3	Meningkatnya penanganan korban KDRT dan Trafficking	Rasio KDRT	0,7%	12,34%
4	Meningkatnya koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,93%	-
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68%	-

**Tabel 3.1.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021, 2022 dan Target Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Padang Lawas Utara**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	3,04	3,13	-
		Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 Perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	12,35	4,94	-
2	Meningkatnya peserta KB aktif	Persentase Pemakaian Kontrasepsi	44,22%	49,84%	-

		Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)			
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeetneed)	27%	32%	-
3	Meningkatnya penanganan korban KDRT dan Traficking	Rasio KDRT	0,09%	0,4%	-
4	Meningkatnya koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,06%	-	-
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,14%	-	-

3.2 Analisa Dan Evaluasi Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara telah menetapkan 5 Program yang akan dicapai. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing Sasaran Strategis Program Kegiatan diuraikan pada Tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	10	11
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				
			Advokasi Program KKBPK kepada mitra stakeholder dan mitra kerja	12 kecamatan	12 kecamatan	Belum optimalnya dukungan stakeholder dan mitra kerja terhadap Program bangga Kencana	Melakukan sosialisasi terhadap stakeholder dan mitra kerja di Kecamatan Kencana
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	12 kecamatan	12 kecamatan	Belum optimalnya sosialisasi pentingnya melakukan KB (Keluarga Berencana) dan manfaatnya dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	Sosialisasi pentingnya melakukan KB (Keluarga Berencana) dan manfaatnya dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 kecamatan	12 kecamatan	Belum optimalnya evaluasi pendampingan dan pemantauan keluarga resiko stunting	Melakukan pertemuan dalam evaluasi pendampingan dan pemantauan keluarga resiko stunting di Kecamatan
			Promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	12 kecamatan	12 kecamatan	Belum optimalnya promosi dan KIE program KKBPK	Melakukan promosi dan KIE kepada masyarakat melalui film pendek tentang pencegahan stunting

			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	12 balai	12 balai	Belum optimalnya pengelolaan operasioanal di Balai Penyuluhan	Melakukan pertemuan yang terjadwal tentang kendala dalam pengelolaan operasional dan sarana di balai Penyuluhan
			Pengendalian Program KKBPK (Audit Kasus Stunting)	1 OPD	1 OPD	Belum optimalnya upaya mencari penyebab terjadinya kasus stunting	Melakukan kegiatan identifikasi jumlah kasus dan evaluasi hasil tindak lanjut pada kasus stunting
		Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 Perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				
			Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	1668 OB	1666 OB	Adanya PLKB yang mengundurkan diri sebelum anggaran tahun berjalan habis	Membuat surat pernyataan dengan PLKB terkait pengunduran diri sebelum habis anggaran tahun berjalan
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	776 PPKBD dan Sub PPKBD	776 PPKBD dan Sub PPKBD	Belum maksimalnya KIE yang diterima masyarakat tentang KB sehingga diperlukan kader untuk menyampaikan informasi tentang KB	Peningkatan pemahaman masyarakat melalui kader PPKBD dan Sub PPKBD
2	Meningkatnya peserta KB aktif	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	22 Faskes	22 Faskes	Masih jauhnya jarak tempuh ke Faskes sehingga calon akseptor dalam mendapatkan pelayanan KB tidak maksimal	Melakukan pelayanan dari rumah ke rumah

						Adanya ketakutan masyarakat dalam melakukan (Medis Operasi Wanita (MOW) masih menggunakan metode operasi manual (Minilap) dan berusaha menggunakan metode Laparoskopi	Meyakinkan masyarakat bahwasanya MOW bukan merupakan operasi besar
			Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1682 akseptor	1682 akseptor	Masing tingginya Angka Kelahiran Total di masyarakat	Memberikan bantuan alokon kepada Faskes secara gratis dan layanan kepada calon akseptor secara gratis
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	6 balai	6 balai	Belum optimalnya sarana dalam melakukan pelayanan KB	Mengadakan sarana penunjang dalam pelayanan KB
			Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitasi kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	22 Faskes	22 Faskes	Sebagian besar dari Kelompok Kegiatan masih merasa tabu jika membicarakan kesehatan reproduksi.	Sosialisasi pentingnya mengetahui kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeetneed)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	56 Kampung KB	56 Kampung KB	Belum optimalnya Kelompok Kerja (Pokja), Kelompok Kegiatan (Poktan), dan Lini Lapangan yang ada di kampung KB	Sosialisasi pentingnya melakukan KB (Keluarga Berencana) dan manfaatnya dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera kepada Pokja, Poktan dan Lini Lapangan
3	Meningkatnya koordinasi dan jaringan pengarustamaan gender (PUG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan				

			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	350 Orang	Belum optimalnya KIE tentang pemberdayaan perempuan	Meningkatkan KIE pemberdayaan perempuan
4	Meningkatnya penanganan korban KDRT dan Trafficking	Rasio KDRT	Program Perlindungan Perempuan				
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				
			Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten /Kota	4 Kasus	4 Kasus	Belum optimalnya SDM dalam menangani kasus yang ada dan keterbatasan anggaran dilihat dari jumlah kasus yang terjadi	Melakukan pelatihan terhadap kader P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak)
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)				
			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	Belum optimalnya Forum Anak di tingkat kabupaten dan Kabupaten Padang Lawas Utara belum Layak Menjadi Kota Layak Anak	Penguatan Forum Anak Kabupaten, Pebentukan Forum Anak di Kecamatan dan menjadikan Kabupaten Padang Lawas Utara menjadi Kota Layak Anak
			Program Perlindungan Khusus Anak				
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan				
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8 Kasus	8 Kasus	Belum optimalnya SDM dalam menangani kasus yang ada dan keterbatasan anggaran dilihat dari jumlah kasus yang terjadi	Melakukan pelatihan terhadap kader P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak)

I. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) tersebut dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan Kab. Padang Lawas Utara nomor 2 yaitu 'Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat' pointer ke 2 'meningkatnya derajat kesehatan masyarakat'. Program ini memiliki Indikator Kinerja Kunci yaitu TFR (Angka Kelahiran Total) dengan target 3,2 dan terealisasi 3,13; Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR) dengan target 67,6% dan terealisasi 49,84%; dan Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dengan target 20,51% dan terealisasi 32%.

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yang terealisasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

Dalam kegiatan ini ada beberapa Sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja

Dalam pelaksanaan kegiatan ini yang dilakukan sosialisasi terhadap stakeholder dan mitra kerja di Kecamatan. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp 154.393.700 dan terealisasi sebesar Rp 153.712.000 yang artinya terealisasi secara anggaran sebesar 99,56%. Target dari kegiatan tersebut terlaksananya sosialisasi di 12 Kecamatan dan target tersebut tercapai 100%.

- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal

Dalam pelaksanaan kegiatan ini yang dilakukan adalah penyampaian informasi dengan mengadakan pertemuan sosialisasi pentingnya melakukan KB (Keluarga Berencana) dan manfaatnya dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp 24.856.000 dan terealisasi sebesar Rp 24.835.000 yang artinya terealisasi secara anggaran sebesar 99,92%. Target dari kegiatan tersebut terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di 12 Kecamatan dan target tersebut tercapai 100%.

- Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

Dalam pelaksanaan kegiatan ini yang dilakukan adalah promosi dan KIE kepada masyarakat melui film pendek tentang pencegahan stunting. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp 70.784.000 dan terealisasi sebesar Rp 70.229.000 yang artinya terealisasi secara anggaran sebesar 99,22%. Target dari kegiatan tersebut terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi tetang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di 12 Kecamatan lewat film pencegahan stunting dan target tersebut tercapai 100%.

- *Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)*

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini berupaya melakukan pertemuan dalam evaluasi pendampingan dan pemantauan keluarga resiko stunting di Kecamatan. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp 187.200.000 dan terealisasi sebesar Rp 187.200.000 yang artinya terealisasi secara anggaran sebesar 100%. Indikator dari kegiatan ini terlaksananya pertemuan di 12 kecamatan dan target tersebut tercapai 100%.

- *Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK*

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pertemuan yang terjadwal tetang kendala dalam pengelolaan operasional dan sarana di balai Penyuluhan. Indikator dari pelaksanaan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK yaitu terlaksananya operasional balai penyuluhan KB ke 12 balai. Kegiatan ini terlaksana 100% dari target yang ditetapkan yaitu 12 balai. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp 486.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 443.826.000 yang artinya terealisasi secara anggaran sebesar 91,32%.

- *Pengendalian Program KKBPK*

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini melakukan identifikasi jumlah kasus dan evaluasi hasil tindak lanjut pada kasus stunting (audit kasus stunting) yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp 40.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 40.000.000 yang artinya terealisasi secara anggaran sebesar 100%. Indikator dari kegiatan ini terlaksananya identifikasi jumlah kasus dan evaluasi kasus stunting di 1 OPD dan target tersebut tercapai 100%.

2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Dalam kegiatan ini ada beberapa Sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- *Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB*

Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana dan informasi keluarga berencana melalui petugas lapangan PKB/PLKB yang memiliki kemampuan pelayanan dan pelaksanaan program KB di lini lapangan. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp 1.668.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.666.000.000 yang artinya terealisasi secara anggaran sebesar 99,88%. Target dari kegiatan tersebut terbayarnya honor PLKB sebanyak 1.668 OB dan realisasinya 1.666 OB karena adanya satu Petugas Lapangan Keluarga Berencana (KB) yang mengundurkan diri dari PLKB pada bulan Oktober tahun 2022, hal ini menunjukkan target tercapai sebanyak 99,88 %.

- *Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)*

Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) diperlukan . untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui kader PPKBD dan Sub PPKBD. Indikator dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu adanya operasional pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD. Operasional ini ditargetkan diberikan kepada 776 PPKBD dan Sub-PPKBD. Namun pada realisasinya ada sebagian dari PPKBD dan Sub PPKBD yang tidak mengantarkan laporan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ber KB pada bulan bulan berikutnya ke Balai Penyuluhan yang menjadi wilayah kerjanya sehingga tidak di bayarkan atas tugasnya yang tidak dilaksanakannya. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp 1.862.400.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.836.000.000 yang artinya terealisasi secara anggaran sebesar 98,58%.

3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Dalam kegiatan ini ada beberapa Sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- *Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pendistribusian alokon ke Faskes yang teregister dalam K/0/KB. Selain itu memberikan pelayanan KB kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) kepada calon akseptor di seluruh Faskes, namun untuk Medis Operasi Wanita (MOW) hanya dilakukan pada satu titik Faskes yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Padang Lawas Utara. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut ditargetkan tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan

KB di 22 Faskes dan terealisasi sebanyak 22 Faskes (100%). Jumlah anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp 9.900.000 dan terealisasi sebesar Rp 9.900.000, atau 100%.

- *Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini bertujuan memberikan bantuan alokon kepada Faskes secara gratis dan layanan kepada calon akseptor secara gratis. Jumlah anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp 384.219.600 dan terealisasi sebesar Rp 383.719.200, atau 99,87%. Target dari kegiatan tersebut terlayannya calon akseptor sebanyak 1682 akseptor dan target tersebut tercapai 100%.

- *Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*

Dalam pelaksanaan kegiatan ini yang dilakukan yaitu sosialisasi pentingnya mengetahui kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp 9.600.000 dan terealisasi sebesar Rp 9.600.000 yang artinya terealisasi secara anggaran sebesar 100%. Target dari kegiatan ini terlaksananya sosialisasi di 22 Faskes dan target tersebut tercapai 100%.

4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Dalam kegiatan ini Sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- *Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB*

Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung KB melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Dalam mencapai tujuan Program KKBPK dilakukan pembinaan terhadap Kelompok Kerja (Pokja), Kelompok Kegiatan (Poktan) dan Lini Lapangan. Kegiatan tersebut ditargetkan terlaksananya Pengelolaan Program KKBPK di 56 Kampung KB dan terealisasi sebanyak 56 kampung KB artinya tercapai 100%. Jumlah anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp 966.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 966.000.000 atau 100%.

II. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan merupakan penjabaran misi poin ke lima belas yaitu 'Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan dengan memperhatikan kesetaraan gender'. Disamping itu Program tersebut dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan Kab. Padang Lawas Utara nomor 2 yaitu 'Meningkatkan Kualitas Hidup

Masyarakat' pointer ke tiga 'Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan'. Program ini memiliki Indikator Kinerja Kunci yaitu Persentase ARG pada belanja langsung APBD dengan target 0,6% dan terealisasi 0,01%.

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yang terealisasi sebagai berikut:

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Dalam kegiatan ini Sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- *Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG*

Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan agar tercapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program serta permasalahan perempuan dan laki-laki. Selain itu kebijakan ini dibuat karena belum optimalnya dukungan lingkungan pemerintah daerah terhadap Pengarus Utamaan. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp 119.110.000 dan terealisasi sebesar Rp 117.062.000 yang artinya terealisasi secara anggaran sebesar 98,28%. Target dari kegiatan tersebut 3 Kebijakan yaitu Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor: 800/232/K/2022 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga, dan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor: 800/251/K/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Profil Kabupaten Layak Anak, target tersebut tercapai 100%.

- *Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG*

Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan agar tercapai kesetaraan dan keadilan gender serta meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pada masyarakat yang memiliki ekonomi lemah. Selain itu sosialisasi ini dibuat karena masih kurang pemahaman masyarakat tentang PUG dan diharapkan OPD-OPD merencanakan kegiatan yang mendukung PUG tersebut. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp 150.820.900 dan terealisasi sebesar Rp 128.698.400 yang artinya terealisasi secara anggaran sebesar 85,33%. Target dari kegiatan tersebut dihadiri oleh 120 peserta dan target tersebut tercapai 100%.

2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Dalam kegiatan ini Sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- *Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menyampaikan informasi dan edukasi tentang pemberdayaan perempuan. Hal ini dilakukan supaya pengetahuan

masyarakat meningkat tentang pemberdayaan perempuan dan perempuan lebih diberdayakan dimasyarakat. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp 342.279.100 dan terealisasi sebesar Rp 314.915.800 yang artinya terealisasi secara anggaran sebesar 92,01%. Target dari kegiatan tersebut tersampainya informasi dan edukasi terhadap 350 orang dan target tersebut tercapai 100%.

III. Program Perlindungan Khusus Anak

Perlindungan Khusus Anak dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan Kab. Padang Lawas Utara nomor 2 yaitu 'Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. Program ini memiliki Indikator Kinerja Kunci yaitu Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten dengan target 75% dan terealisasi 72,73%.

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yang terealisasi sebagai berikut:

1. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan

Dalam kegiatan ini Sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- *Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*

Dalam kegiatan ini hanya ada satu Sub Kegiatan yang dilakukan yaitu Pendampingan Kasus Bagi Anak Korban (KDRT), seksual dan Trafficking. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp 66.684.000 dan terealisasi sebesar Rp 60.070.000 yang artinya terealisasi secara anggaran sebesar 90,08%. Target dari kegiatan ini tertanganinya 8 kasus yang melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan target tersebut tercapai 8 kasus artinya 100%.

IV. Program Perlindungan Perempuan

Program Perlindungan Perempuan merupakan penjabaran misi poin ke lima belas yaitu 'Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan dengan memperhatikan kesetaraan gender'. Disamping itu Program tersebut dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan Kab. Padang Lawas Utara nomor 2 yaitu 'Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat' pointer ke tiga 'Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan'. Program ini memiliki Indikator Kinerja Kunci yaitu Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (Per 100.000 penduduk perempuan) dengan target 1,42% dan terealisasi 6,78%.

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yang terealisasi sebagai berikut:

1. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Dalam kegiatan ini Sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- *Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota*

Dalam kegiatan ini hanya ada satu Sub Kegiatan yang dilakukan yaitu Pendampingan Kasus Bagi Perempuan Korban KDRT. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp 40.384.000 dan terealisasi sebesar Rp 32.128.000 yang artinya terealisasi secara anggaran sebesar 79,65%. Target dari kegiatan ini tertanganinya 4 kasus yang melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan target tersebut tercapai 100%.

V. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) merupakan upaya mewujudkan tujuan pembangunan Kab. Padang Lawas Utara nomor 2 yaitu 'Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

Dalam program ini kegiatan yang terealisasi sebagai berikut:

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Dalam kegiatan ini Sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- *Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.*

Dalam kegiatan ini hanya ada satu Sub Kegiatan yang dilaksanakan. Dalam kegiatan ini yang dilaksanakan yaitu penguatan Koordinasi dan sinkronisasi untuk membentuk Kabupaten Kota Layak Anak dan Momentum Hari Anak. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp 155.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 151.875.619 yang artinya terealisasi secara anggaran sebesar 97,98%. Target dari kegiatan tersebut dihadiri 300 orang dan target tersebut tercapai 100%.

3.3 Realisasi Anggaran

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara alokasi dan realisasi anggaran menurut program/kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Realisasi Anggaran
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.703.950.391,00	4.469.005.927,00	95,01	234.944.464,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.772.600,00	30.480.400,00	99,05	292.200,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.610.200,00	22.448.400,00	99,28	161.800,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.145.200,00	3.096.000,00	98,44	49.200,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.017.200,00	4.936.000,00	98,38	81.200,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.648.377.591,00	3.569.685.093,00	97,84	78.692.498,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.344.221.091,00	3.265.709.943,00	97,65	78.511.148,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	300.678.000,00	300.555.150,00	99,96	122.850,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.478.500,00	3.420.000,00	98,32	58.500,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	669.616.700,00	535.919.944,00	80,03	133.696.756,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.243.800,00	23.935.000,00	98,73	308.800,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	239.803.100,00	226.096.000,00	94,28	13.707.100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.193.600,00	24.509.000,00	93,57	1.684.600,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.713.800,00	11.662.000,00	99,56	51.800,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.250.000,00	19.140.000,00	99,43	110.000,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	348.412.400,00	230.577.944,00	66,18	117.834.456,00
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.827.400,00	102.639.352,00	92,61	8.188.048,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.260.000,00	36.565.352,00	82,61	7.694.648,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.567.400,00	61.074.000,00	99,20	493.400,00
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.356.100,00	230.281.138,00	94,24	14.074.962,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	231.246.100,00	217.196.138,00	93,92	14.049.962,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.110.000,00	13.085.000,00	99,81	25.000,00
II	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	784.892.000,00	727.166.200,00	92,65	57.725.800,00
6	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	269.930.900,00	245.760.400,00	91,05	24.170.500,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	119.110.000,00	117.062.000,00	98,28	2.048.000,00
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	150.820.900,00	128.698.400,00	85,33	22.122.500,00
7	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	172.682.000,00	166.490.000,00	96,41	6.192.000,00
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	172.682.000,00	166.490.000,00	96,41	6.192.000,00
8	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	342.279.100,00	314.915.800,00	92,01	27.363.300,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	Kewenangan Kabupaten/Kota				
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	342.279.100,00	314.915.800,00	92,01	27.363.300,00
III	Program Perlindungan Perempuan	40.384.000,00	32.128.000,00	79,56	8.256.000,00
9	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40.384.000,00	32.128.000,00	79,56	8.256.000,00
	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	40.384.000,00	32.128.000,00	79,56	8.256.000,00
IV	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	155.000.000,00	151.875.619,00	97,98	3.124.381,00
10	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	155.000.000,00	151.875.619,00	97,98	3.124.381,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	155.000.000,00	151.875.619,00	97,98	3.124.381,00
V	Program Perlindungan Khusus Anak	131.684.000,00	122.777.400,00	93,24	8.906.600,00
11	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000,00	62.707.400,00	96,47	2.292.600,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	65.000.000,00	62.707.400,00	96,47	2.292.600,00
12	Penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	66.684.000,00	60.070.000,00	90,08	6.614.000,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	66.684.000,00	60.070.000,00	90,08	6.614.000,00
V	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	340.525.800,00	336.787.000,00	98,90	3.738.800,00
13	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	219.905.800,00	216.304.000,00	98,36	3.601.800,00
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	219.905.800,00	216.304.000,00	98,36	3.601.800,00
14	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	120.620.000,00	120.483.000,00	99,89	137.000,00
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	3.020.000,00	3.020.000,00	100,00	0,00
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	117.600.000,00	117.463.000,00	99,88	137.000,00
VI	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.506.334.300,00	6.432.192.700,00	98,86	74.141.600,00
14	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	963.233.700,00	919.802.000,00	95,49	43.431.700,00
	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	154.393.700,00	153.712.000,00	99,56	681.700,00
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	24.856.000,00	24.835.000,00	99,92	21.000,00
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.784.000,00	70.229.000,00	99,22	555.000,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	187.200.000,00	187.200.000,00	100,00	0,00
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	486.000.000,00	443.826.000,00	91,32	42.174.000,00
	Pengendalian Program KKBPK	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00
15	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	3.530.400.000,00	3.502.000.000,00	99,20	28.400.000,00
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	1.668.000.000,00	1.666.000.000,00	99,88	2.000.000,00
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.862.400.000,00	1.836.000.000,00	98,58	26.400.000,00
16	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.046.700.600,00	1.044.390.700,00	99,78	2.309.900,00
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00	0,00
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	384.219.600,00	383.719.200,00	99,87	500.400,00
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	642.981.000,00	641.171.500,00	99,72	1.809.500,00
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	0,00
17	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	966.000.000,00	966.000.000,00	100,00	0,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPB di Kampung KB	966.000.000,00	966.000.000,00	100,00	0,00
VII	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.616.400.000,00	1.522.457.908,00	58,19	1.093.942.092,00
18	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.616.400.000,00	1.522.457.908,00	58,19	1.093.942.092,00
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	330.000.000,00	326.943.750,00	99,07	3.056.250,00
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.286.400.000,00	1.195.514.158,00	52,29	1.090.885.842,00
TOTAL		15.279.170.491,00	13.794.390.754,00	90,28	1.484.779.737,00

TABEL 3.4
REALISASI ANGGARAN YANG MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
I	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	963.233.700	919.802.000	95,49%	43.431.700
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	963.233.700	919.802.000	95,49%	43.431.700
	<i>Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja</i>	154.393.700	153.712.000	99,56%	681.700
	<i>Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	24.856.000	24.835.000	99,92%	21.000
	<i>Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</i>	70.784.000	70.229.000	99,22%	555.000
	<i>Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)</i>	187.200.000	187.200.000	100,00%	-
	<i>Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK</i>	486.000.000	443.826.000	91,32%	42.174.000
	<i>Pengendalian Program KKBPK</i>	40.000.000	40.000.000	100,00%	-
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	3.530.400.000	3.502.000.000	99,20%	28.400.000
	<i>Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB</i>	1.668.000.000	1.666.000.000	99,88%	2.000.000
	<i>Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>	1.862.400.000	1.836.000.000	98,58%	26.400.000

3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.046.700.600	1.044.390.700	99,78%	2.309.900
	<i>Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	9.900.000	9.900.000	100,00%	-
	<i>Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>	384.219.600	383.719.200	99,87%	500.400
	<i>Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>	642.981.000	641.171.500	99,72%	1.809.500
	<i>Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	9.600.000	9.600.000	100,00%	-
4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	966.000.000	966.000.000	100,00%	-
	<i>Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB</i>	966.000.000	966.000.000	100,00%	-
II	Program Pengarus Utama Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	612.210.000	560.676.200	91,58%	51.533.800
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	269.930.900	245.760.400	91,05%	24.170.500
	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG</i>	119.110.000	117.062.000	98,28%	2.048.000
	<i>Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG</i>	150.820.900	128.698.400	85,33%	22.122.500
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	342.279.100	314.915.800	92,01%	27.363.300
	<i>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	342.279.100	314.915.800	92,01%	27.363.300

III	Program Perlindungan Khusus Anak	133.368.000	120.140.000	90,08%	13.228.000
1	Penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	66.684.000	60.070.000	90,08%	6.614.000
	<i>Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>66.684.000</i>	<i>60.070.000</i>	<i>90,08%</i>	<i>6.614.000</i>
IV	Program Perlindungan Perempuan	40.384.000	32.128.000	79,56%	8.256.000
1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40.384.000	32.128.000	79,56%	8.256.000
	<i>Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>40.384.000</i>	<i>32.128.000</i>	<i>79,56%</i>	<i>8.256.000</i>
V	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	155.000.000	151.875.619	97,98%	3.124.381
1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	155.000.000	151.875.619	97,98%	3.124.381
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>155.000.000</i>	<i>151.875.619</i>	<i>97,98%</i>	<i>3.124.381</i>
	JUMLAH	1.904.195.700	1.784.621.819	93,72%	119.573.881

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan Capaian Kinerja

Laporan Kinerja (LK) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 yang disusun ini merupakan wujud dukungan sistem administrasi yang diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi semakin profesional, efisien dan efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai umpan balik (*feed back*) bagi manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 antara lain :

- a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan Sesuai Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Jabatan Struktural, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas, Badan, Kantor Serta Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Padang Lawas Utara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi telah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya aparatur yang dimiliki yang tentunya tetap mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit organisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara. Selain itu, pelaksanaan pelayanan aparatur maupun pelayanan masyarakat yang melekat pada tugas dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan juga tetap mengupayakan pada pemenuhan kebutuhan stakeholder lembaga ini.
- b. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban diperoleh dari laporan kinerja masing-masing unit organisasi

dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis. Penetapan sasaran strategik ini mengacu pada pemenuhan tujuan, misi dan visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana telah disepakati dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 – 2023

- c. Dalam hal pencapaian sasaran yang ditetapkan dapat terlihat bahwa tidak seluruhnya dapat mencapai kinerja yang diharapkan. Beberapa pokok permasalahan yang menjadi kendala pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara terutama disebabkan karena keterbatasan – keterbatasan baik pendanaan maupun sumberdaya manusianya. Namun untuk tahun-tahun mendatang hal tersebut akan diupayakan untuk memperkecil kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kinerja yang ingin dicapai, tentunya dengan mengacu kepada sasaran dan program prioritas.

4.2 Langkah Strategis Penguatan Capaian Kinerja Masa Datang

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlu dipikirkan penambahan program dan kegiatan baru yang diiringi dengan penambahan anggaran, untuk lebih mempercepat capaian kinerja ditahun-tahun akan datang.
2. Melakukan evaluasi bulanan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang, yang diikuti identifikasi setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya.
3. Perlunya pengawasan khusus dari masing-masing kepala bidang sehingga target yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja (PK) dapat tercapai.
4. Peningkatan kompetensi akuntabel seperti yang diharapkan. SDM Aparatur agar terwujudnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara transparan dan Akuntabel.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah pada Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-perundangan yang berlaku.

Atas perhatian semua pihak diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA



HASBULLAH HARAHAP, S.Sos, MM

NIP. 19740222 199703 1 003